**Indonesia. Peningkatan produksi harus memenuhi hak atas pangan untuk semua, kata ahli PBB**

JENEWA (19 April 2018) - Kebijakan Indonesia yang sukses dalam meningkatkan produksi beras harus dikaitkan dengan pemenuhan kewajibannya terhadap hak atas pangan untuk semua, ungkap Hilal Elver, Pelapor Khusus PBB untuk hak atas pangan.

“Indonesia telah tumbuh sebagai salah satu eksportir komoditas pertanian dan ikan terkemuka. Kelihatannya seolah-olah ada banyak makanan di Indonesia,” kata sang ahli PBB dalam sebuah pernyataan di akhir kunjungan 10 hari ke negara itu.

“Tapi apa yang mengejutkan saya adalah ironi bahwa di suatu negara penghasil makanan terkemuka, 30 persen anak-anak mengalami pertumbuhan yang terhambat, dan lebih dari 92% penduduknya makan buah dan sayuran jauh lebih sedikit daripada tingkat yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Ini menandakan bahwa: makanan bukan hanya tentang kuantitas tetapi juga tentang kualitas, aksesibilitas, dan keterjangkauan. Orang-orang yang tinggal di daerah terpencil memiliki akses terbatas terhadap makanan sehat, dan penduduk miskin di perkotaan tidak mampu membeli buah dan sayuran, yang harganya sangat mahal,” tambahnya.

Pelapor Khusus mencatat bahwa Indonesia berurusan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi makanan pokok yang berlebihan seperti beras dan jagung, serta pola makan yang tidak mengandung cukup buah dan sayuran. Ia mengakui bahwa Pemerintah telah menanggapi masalah ini dengan mengadopsi kebijakan yang bertujuan mempromosikan ketahanan pangan dan menjadikan gizi sebagai prioritas. Namun dia mengatakan, subsidi untuk mencapai swasembada beras tidak membantu mengkampanyekan pola makan yang lebih beragam dan sehat.

“Saya memuji upaya Pemerintah dan mendorong Pemerintah untuk mengambil pendekatan holistik terhadap kebijakan pangannya sambil mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk ketahanan pangan. Juga harus meningkatkan kebijakan pangan dan nutrisi dengan memastikan akses terhadap pangan - secara ekonomi dan fisik, ketersediaan dan kecukupan pangan berkualitas, sambil menghapus akar penyebab kerentanan pangan termasuk kemiskinan. Pemerintah harus memberi perhatian ekstra kepada orang-orang yang tinggal di daerah terpencil, menyoroti penderitaan masyarakat yang tidak memiliki lahan dan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan,” tegas sang pakar.

Meskipun urbanisasi berjalan dengan cepat, mayoritas orang Indonesia, terutama petani, nelayan dan masyarakat adat serta pekebun tinggal di daerah yang seringkali memiliki akses sangat terbatas ke berbagai makanan, yang diperlukan untuk pola makan yang sehat.

Pakar PBB ini menjelaskan bahwa Pemerintah menghadapi sejumlah tantangan terkait penerapan hak atas pangan. Di antaranya termasuk konflik kepemilikan lahan sebagai akibat dari akuisisi lahan dan air berskala besar, serta masalah yang timbul dari legalisasi penguasaan lahan tradisional, sementara masyarakat nelayan menjadi lebih rentan karena menipisnya stok ikan dan penangkapan ikan ilegal. Masalah tambahan muncul dari industri minyak sawit dan operasi penambangan, yang melibatkan proyek-proyek pembangunan yang mengancam mata pencaharian penduduk serta menyebabkan pencemaran lingkungan. Indonesia juga terkena dampak negatif perubahan iklim di sepanjang zona pesisirnya yang luas, ia menambahkan.

Ms Elver berkata: “Seorang pejabat Pemerintah mengatakan kepada saya, 'Saya setuju tantangan adalah peluang - peluang untuk peningkatan dan menuju perwujudan penuh hak atas pangan untuk semua orang di Indonesia.' Jadi, saya mendorong Pemerintah untuk memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha memperbaiki kebijakan pangan dengan cara yang responsif terhadap hak asasi manusia.”

Laporan akhir Pelapor Khusus akan dipresentasikan pada sesi Dewan Hak Asasi Manusia PBB mendatang di Jenewa.

SELESAI

***Hilal Elver*** *(Turki) ditunjuk sebagai* [*Pelapor Khusus Hak Pangan*](https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/FoodIndex.aspx) *oleh Dewan Hak Asasi Manusia pada tahun 2014. Elver adalah seorang Profesor Riset, dan salah satu direktur Proyek tentang Perubahan Iklim Global, Keamanan Manusia, dan Demokrasi yang bertempat di Orfalea Center untuk Pusat Studi Global & Internasional dan anggota terhormat di University of California Los Angeles Law School (UCLA) Resnick Food Law and Policy Center.*

*Pelapor Khusus adalah bagian dari apa yang dikenal sebagai* [*Prosedur Khusus*](https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx) *Dewan Hak Asasi Manusia.Prosedur Khusus, badan ahli independen terbesar dalam sistem Hak Asasi Manusia PBB, merupakan nama umum dari mekanisme pencarian fakta independen dan mekanisme pemantauan yang membahas situasi negara tertentu atau masalah tematik di seluruh bagian dunia. Ahli Prosedur Khusus bekerja secara sukarela; mereka bukan staf PBB dan tidak menerima gaji untuk pekerjaan mereka. Mereka terlepas dari pemerintahan atau organisasi manapun dan melayani dalam kapasitas masing-masing.*

*UN Human Rights Country Page –* [Indonesia](https://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/IDIndex.aspx)

*Untuk pertanyaan dan* ***keperluan******media****, silahkan menghubungi:*

***Di Indonesia (selama kunjungan)****: Soo-Young Hwang (+41 79 444 4702/* *shwang@ohchr.org**). Di Jenewa: Viktoria Aberg (+41 22 917 9790* */vaberg@ohchr.org**)*

*Untuk* ***pertanyaan media*** *terkait dengan ahli independen PBB lainnya, silahkan hubungi Jeremy Laurence, UN Human Rights – Media Unit (+41 22 917 9383 /* *jlaurence@ohchr.org**)*

*Tahun ini, 2018, adalah* ***peringatan ke-70 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,*** *yang diadopsi oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi Universal – diterjemahkan ke dalam rekor dunia 500 bahasa – berakar pada prinsip bahwa “semua manusia dilahirkan bebas dan setara dengan martabat dan hak”. Hal ini relevan untuk semua orang, setiap harinya. Untuk menghormati peringatan ke-70 dokumen yang sangat berpengaruh ini, dan untuk mencegah prinsip-prinsip penting di dalamnya agar tidak terkikis, kami mengajak semua orang di mana saja untuk Berdiri untuk Hak Asasi Manusia:* [*www.standup4humanrights.org*](http://www.standup4humanrights.org)